

Abstract

This research aims to determine and analyze the coordination that has been carried out by the Jambi City government in dealing with street children, as well as the supporting and inhibiting factors of this coordination. By using a descriptive qualitative approach. The focus of this research refers to coordination, namely unity of activity, communication, division of work and discipline. Data collection was carried out through interviews and documentation. Data sources were obtained through two sources, namely primary data and secondary data. The results of the research show that coordination between the Social Service, Satpol PP, and DPMPPA in handling street children in Jambi City is running quite well and in accordance with Mayor Regulation no. 29 of 2016 concerning Handling Homeless People, Beggars and Street Children. Each agency has a clear and complementary role, with informal communication via letter, WhatsApp and telephone supporting quick responses. However, the lack of formal coordination meetings hampers the effectiveness of activity planning and evaluation. A clear division of labor and flexibility in handling situations in the field enable an adaptive response. Discipline needs to be improved because sectoral egos hinder optimal coordination. Current approaches are temporary and do not include the long-term coaching that is needed. Thus, coordination between the Social Service, Satpol PP, and DPMPPA in handling street children in Jambi City needs to be improved to achieve more optimal results.

Keywords: *Coordination, Handling, Street Children*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam menangani anak jalanan, serta faktor pendukung dan penghambat dari koordinasi ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini mengacu pada koordinasi yakni kesatuan kegiatan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh melalui dua sumber yakni data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan DPMPPA dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Masing-masing instansi memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi, dengan komunikasi informal melalui surat, WhatsApp, dan telepon yang mendukung respon cepat. Namun, kurangnya rapat koordinasi formal menghambat efektivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan. Pembagian kerja yang jelas dan fleksibilitas dalam penanganan situasi di lapangan memungkinkan respons yang adaptif. Disiplin perlu ditingkatkan karena ego sektoral menghambat koordinasi optimal. Pendekatan saat ini bersifat sementara dan belum mencakup pembinaan jangka panjang yang diperlukan. Dengan demikian, koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan DPMPPA dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Koordinasi, Penanganan, Anak Jalanan